

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Study Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Maulida
NPM : 1505170676
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

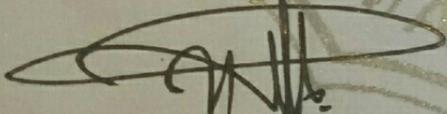
MEMUTUSKAN

Nama : MAULIDA
N P M : 1505178576
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

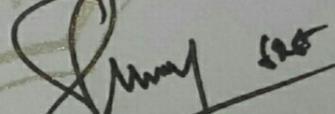
Dinyatakan (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

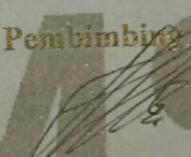
Penguji I


(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

Penguji II

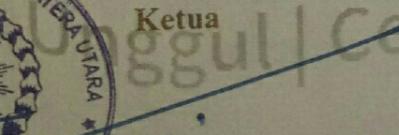

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

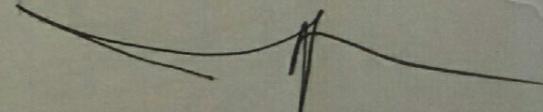

(Dr. MUHYAR SYAH, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua


(NUR HANI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MAULIDA
N P M : 1505170676
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 5 September 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE. M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, M.M. M.Si.)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulida
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Bangun, 12 Agustus 1996
NPM : 1505170676
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dengan penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi ini bebas dari segala bentuk **PLAGIAT**. Apabila dikemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 5 Oktober 2019
Saya yang menyatakan



MAULIDA

ABSTRAK

Maulida. NPM 1505170676, Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Skripsi. 2019

Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penilaian GCG yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang kinerja keuangannya diukur dengan rasio Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan rasio aktivitas serta dibandingkan dengan standart kinerja keuangan yang di tetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Sumatera Utara. Jenis dan sumber data yang digunakan data kuantitatif dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, walaupun mengalami peningkatan tetapi skor total dari *Good Corporate Governance* (GCG) masih berada dibawah dari standar BUMN. Kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 dalam keadaan yang belum cukup baik yang diukur menggunakan Rasio Keuangan seperti rasio lancar, rasio kas, CP, PP, ROI, ROE, TATO dan TMS. Penilaian *Good Corporate Governance* sebagai alat dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menunjukkan keadaan yang tidak sejalan. Dimana dengan skor GCG untuk tahun 2018 yang mengalami peningkatan, yang tidak berdampak dengan kinerja keuangan perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis karena dengan berkah dan rahmatnya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan study strata I Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Analisis *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**”

Selama Proses penyusunan Skripsi ini banyak bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi baik secara moral maupun material. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Aisyah tercinta, serta kakak tersayang Fatimah, Nursiyah dan Fauziah Amd.Kom dan adik Fadlan Al-Ayubi dan Annisa Firdausi yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dukungan moral, serta material yang tak ternilai harganya sehingga penulis terus termotivasi dalam melaksanakan dan

- menyelesaikan skripsi ini. Bapak Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
 4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 5. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 6. Bapak Dr. Muhyarsyah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan serta masukan yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 7. Seluruh Staf dan karyawan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang telah memberikan kepedulian dan bimbingannya serta masukan dan ilmu yang positif bagi penulis.
 8. Kepada teman-teman kuliah, Sari Agustina, Agustriana, Juliana Safitri, Risa Anisa Prasetya, Chairina Zulmi Tanjung, Retno Asti Nadhira, Indah Yesida, Wardah Hayati dan seluruh teman Akuntansi malam serta sahabat yang mendo'akan dalam diam Nurul Ikhwan Ujung S.pd yang telah memberi support dan dukungannya.

Dengan bantuan dan dukungan yang penulis terima dan akhirnya dengan menyerahkan diri dan sentiasa memohon serta meminta petunjuk kepada Allah SWT, semoga amalan yang baik dan perbuatan baik tersebut dapat imbalan yang baik pula. Aamiin ya Robbal 'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2019
Penulis

MAULIDA
1505170676

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Salah satu pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menilai dari rasio-rasio keuangan perusahaan, Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan, dimana setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu (Murhadi, 2015)

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya *shareholders* dan *bondholders*, dari perusahaan memperoleh pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer. Pelaksanaan *corporate governance* yang baik akan membuat investor memberikan respon positif

terhadap kinerja perusahaan. Lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *corporate governance* merupakan salah satu faktor penentu permasalahan dalam perusahaan. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair (Laksana, 2015)

Mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor yaitu komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan (7%), pemegang saham dan RUPS (9%), dewan komisaris (35%), direksi (35%), pengungkapan dan keterbukaan informasi (9%), faktor lainnya (5%).

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), 2002, menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan GCG akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Adapun pengukuran untuk *Good Corporate governance* yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Good Corporate Governance
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Aspek Pengujian/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Standar BUMN
Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan	6,69%	6,69%	6,7%	6,22%	6,27%	7%
Pemegang saham dan RUPS	8,72%	8,74%	8,74%	8,41%	8,37%	9%
Dewan komisaris	34,58%	34,59%	34,61%	34,53%	34,58%	35%
Direksi	34,57%	34,57%	34,58%	33,10%	33,10%	35%
Pengungkapan dan keterbukaan informasi	8,35%	8,35%	8,36%	7,05%	7,29%	9%
Faktor lainnya	1,25%	1,25%	1,25%	5%	5%	5%
Total	94,16%	94,19%	94,23%	94,3%	94,6%	100%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa untuk skor *good corporate governance* (GCG) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, walaupun mengalami peningkatan tetapi skor total dari *good corporate governance* (GCG) masih berada dibawah dari standar BUMN. Adapun GCG yang masih berada dibawah dari standar BUMN untuk tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi pada 5 indikator yang terdiri dari Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan dan Pemegang saham dan RUPS, Dewan komisaris, Direksi dan Pengungkapan dan keterbukaan informasi.

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2

tahun dalam 2 bentuk yaitu penilaian (*assessment*) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (*review*) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh dewan komisaris.

Selain pengukuran yang dilihat dari *good corporate governance* (GCG), juga dapat diukur dari Kinerja Keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	Standar BUMN No : KEP- 100/MBU/2002
Rasio Kas	175%	132,7%	145,6%	102,7%	74,7%	> 35%
Rasio Lancar	203,3%	158,5%	164,2%	121,2%	97,9%	> 125%
Return On Equity (ROE)	18,4%	19,2%	17,4%	16,4%	13,9%	> 15%
Return On Investment (ROI)	18,6%	18,7%	15,5%	17,7%	20,2%	> 18 %
Total Asset TurnOver (TATO)	43,2%	42,6%	32,9%	38,1%	44,8%	> 120%
Perputaran Persediaan (PP)	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	2 Hari	< 60
Collection Periods (CP)	15 Hari	24 Hari	19 Hari	27 Hari	12 Hari	< 60
Rasio Modal Sendiri Terhadap Asset (TMS)	65,5%	66,3%	58,9%	57,6%	46,2%	30% s/d 40%

Sumber : Laporan Keuangan yang diolah

Berdasarkan tabel 1.1 kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kas, rasio lancar, *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), perputaran

persediaan, perputaran piutang, *total asset turnover* (TATO) dan rasio modal sendiri terhadap total asset (TMS) untuk tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Dan untuk rasio keuangan yang diukur berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Sedangkan yang berada dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yang terjadi untuk tahun 2018 terlihat dari rasio lancar, ROE, dan TATO

Menurut (Bahtiar et al., 2010) manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*

Menurut (Prastantio, 2015), GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) keuangan kepada semua stakeholder. (Drs. Dwi Prastowo D., M.M., 2015) menyebutkan ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:3), laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan dari peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti (Prastantio, 2015) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan analisis rasio keuangan perusahaan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia II telah cukup baik yang membantu dalam peningkatan kinerja perusahaan..

Berdasarkan uraian diatas sangat penting pengukuran atas penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “**Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat diidentifikasi masalah mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan yaitu:

1. Skor GCG untuk tahun 2014-2017 masih berada dibawah standar BUMN
2. Rasio lancar, rasio kas, Return On Equity (*ROE*), PP, CP, dan TMS setiap tahun mengalami penurunan.
3. Untuk tahun 2017 sampai 2018 Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio keuangan masih jauh berada dibawah standar BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian GCG yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)?
2. Bagaimana kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)?
3. Bagaimana GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian GCG yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

2. Manfaat

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan, diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pada perusahaan yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan masa ini dan masa datang.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berminat mengembangkannya dalam taraf yang lebih lanjut dengan penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

GCG merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan di lingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat *control* dan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Menurut (Bahtiar et al., 2010) menyatakan bahwa : GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut (Windah & Andono, 2013) *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2002) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut : “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Menurut (Bagita & Tambun, 2016) *Corporate Governance* adalah : “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik.(Arina Pratiwi &

Budiartha, 2018), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam Corporate Governance, yaitu :

1) *Transparancy* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2) *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3) *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan

perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4) *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik.

Sedangkan menurut (Komara, Hartoyo, & Andati, 2016), Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1) *Transparansi (Transparency)*

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau *materil* dan *relevan* secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, *comparable* dan mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders* karena keyakinan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Disamping itu, perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar *investor* mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Selain laporan keuangan, perusahaan harus menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada *stakeholders*, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (*transparency*), tanpa rekayasa oleh pihak manapun.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari *agency problem* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemegang Saham dan Direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.

3) *Responsibilitas (responsibility)*

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Dengan perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai *Good Corporate Citizen*.

4) *Independensi (Independency)*

Dalam hal ini perusahaan dikelola secara *independent*, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari

conflict of interest dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Dalam hal ini pula, setiap organ perusahaan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain sehingga kejelasan tugas dan tanggung jawab dapat terlihat. Untuk mewujudkan prinsip ini dapat ditempuh dengan penetapan *job description* secara jelas dan memastikan setiap organ telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik sesuai apa yang telah ditentukan.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dapat dipastikan semua *investor* pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap *asset* atau *capital* yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara *fair*, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti *fraud*, *insider trading* dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan prinsip ini, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a) Dalam pengambilan keputusan, perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan kesempatan menyampaikan saran, masukan serta pendapat.
- b) Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan saham minoritas dalam perusahaan.

- c) Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan tanggung jawab semua organ perusahaan.
- d) Menyampaikan informasi penting secara terbuka dan secara wajar.
- e) Memberikan perlakuan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara *professional*.

c. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Geens, 2019) , yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Meningkatkan *corporate value*.
- 3) Meningkatkan kepercayaan investor.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* menurut (Windah & Andono, 2013), yaitu :

- 1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- 2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui

perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.

- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- 4) Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- 5) Mengurangi korupsi.

Penerapan *Good corporate Governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal

- 1) Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010), yaitu :
 - a) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - b) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
 - c) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
 - d) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
 - e) Meningkatkan iklim investasi nasional;

- f) Mensukseskan program privatisasi.

d. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* pada penerbangan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut (Geens, 2019) , unsur-unsur dalam GCG yaitu:

1) *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- a) Pemegang saham;
- b) Direksi;
- c) Dewan komisaris;
- d) Manajer;
- e) Karyawan;
- f) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- g) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

- a) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- b) Transparansi;
- c) Akuntabilitas;
- d) Kesetaraan;
- e) Aturan dari *code of conduct*.

2) *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

- a) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;

- b) Investor;
- c) Institusi penyedia informasi;
- d) Akuntan publik;
- e) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- f) Pemberi pinjaman;
- g) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- a) Aturan dari *code of conduct*;
- b) Kesetaraan;
- c) Akuntabilitas;
- d) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

e. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Penilaian (*assessment*)

Penilaian (*assessment*) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan

GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN.

Penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku. Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi secara langsung. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

2. Evaluasi (*review*)

Evaluasi (*review*) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (*self assessment*). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilai independen atau Jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten, tetapi penilai independen atau Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan Sekretaris Kementerian BUMN. Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/ Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

f. Peraturan Nasional Yang Terkait Dengan Implementasi GCG di Indonesia

Pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 untuk menggantikan UU

Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. Tujuan pembaruan undang-undang tersebut adalah untuk mendukung implementasi GCG. Prinsip GCG mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip GCG harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh undang-undang seperti dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan manajemen keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada para pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas, yaitu adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.
3. Responsibilitas, yaitu pertanggung jawaban perseroan kepada *stakeholders* dengan tidak merugikan kepentingan *stakeholders*. yang ditekankan dalam undang-undang ini Perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku.
4. Keadilan, yaitu prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53

ayat 2 “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur *fairness* (non diskriminatif) antar Pemegang Saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain.

Penerapan tata kelola perusahaan pada BUMN di Indonesia terus ditingkatkan mengingat adanya pembaruan hukum di bidang perseroan terbatas dan BUMN, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif. Peningkatan itu dapat dilihat dari adanya pembaruan Peraturan Menteri BUMN mengenai tata kelola perusahaan, dimana dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pembaruan peraturan menteri tersebut ada beberapa hal yang mengalami perubahan materi secara keseluruhan maupun penyempurnaan materi, Penambahan materi yang sebelumnya tidak tercantum dalam Kep-117/M-MBU/2002, dan Penghapusan materi yang sebelumnya tercantum dalam Kep-117/M-MBU/2002. (Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II.

2. Kinerja Keuangan Perusahaan

a. Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Ada beberapa pengertian analisis rasio yang ditemukan oleh beberapa ahli menurut (Arina Pratiwi & Budiarta, 2018) yang dikemukakan analisis rasio yaitu sebagai berikut: “Pengertian rasio disini sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *aritmatika term* yang dapat digunakan untuk hubungan antara dua macam data *financial*”.

Menurut (S. Wulandari, Manajemen, Slamet, & Surakarta, 2015) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang kadang berbeda. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.

Menurut (R. Wulandari, 2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan memiliki peranan penting dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan.

Dapat disimpulkan menurut bahasa bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah suatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan mengenai keadaan suatu perusahaan yang berdasarkan dengan standart dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut (Hani, 2012) menyatakan bahwa Untuk menilai keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya melihat kondisi internal, karena lingkungan eksternal juga sangat mempengaruhi kelangsungan usaha, sehingga manajemen perusahaan perlu membuat perbandingan keberhasilan usaha dengan pihak lain seperti pesaing kelompok industri atau standart tertentu yang dapat menilai atau

mengukur kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik, sehat atau sebaliknya

b. Jenis Analisa Rasio Keuangan

1) Rasio Likuiditas

Menurut (Munawir, 2010) menyatakan likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Jenis – Jenis Rasio Likuiditas

a) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

b) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan.

c) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

2) Rasio Profitabilitas

Menurut (Munawir, 2010) Rasio Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan dapat diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif.

Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas

a) Profit Margin on Sales

Rasio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

b) Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment/ROI*)

ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

c) Hasil Pengembalian Ekuitasi (*Return on Equity/ROE*)

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

d) Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

3) Rasio Solvabilitas

Menurut (Munawir, 2010) Rasio solvabilitas (*leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang.

Jenis-Jenis Rasio Solvabilitas

a) Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva

Rasio modal sendiri dengan total aktiva merupakan rasio yang menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor.

b) Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap

Rasio modal sendiri dengan aktiva tetap merupakan rasio yang dilakukan dengan membandingkan modal sendiri perusahaan dengan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

c) Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Tetap

Rasio aktiva tetap dengan hutang tetap merupakan rasio yang dilakukan untuk mengukur tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur jangka panjang.

d) Nilai Buku Saham

Nilai buku per lembar saham dilakukan untuk menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada setiap lembar saham.

4. Rasio Aktivitas

Menurut (Munawir, 2010) rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Jenis-Jenis Rasio Aktivitas

a) Perputaran Piutang (*Receivable TurnOver*)

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode.

b) Perputaran Sediaan (*Inventory TurnOver*)

Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (*inventory*) berputar dalam satu periode.

c) Perputaran Modal Kerja (*Working Capital TurnOver*)

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu.

d) *Fixed Assets TurnOver*

Fixed Assets TurnOver merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap.

e) *Total Assets TurnOver*

Total Assets TurnOver merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

Adapun penilaian aspek keuangan yang diukur berdasarkan standar Kementerian BUMN No: KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penilaian Rasio Keuangan Berdasarkan Standar
Kementerian Badan Usaha Milik Negara No: KEP-100/MBU/2002

Rasio Keuangan	Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002
ROI	>18%
ROE	> 15%
Rasio Kas	> 35%
Rasio Lancar	> 125%
Collection Period	< 60 Hari
Perputaran Persediaan	< 60 Hari
Perputaran Total Asset	> 120 %
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset	30% sampai 40%

Keputusan BUMN No : KEP-100/MBU/2002

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
(Prastantio, 2015)	Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)	Variabel : <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja	Hasil dari analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan analisis rasio keuangan perusahaan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia II telah cukup baik yang membantu dalam peningkatan kinerja perusahaan. Lanjutan Tabel 2.2
(R. Wulandari, 2013))	Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel Independent : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependent : Kinerja Keuangan	Hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang positif signifikan dari penerapan good corporate governance terhadap EVA Momentum sebagai alat ukur kinerja perusahaan. dan juga menunjukkan bahwa penerapan GCG secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai investor, imbal hasil investasi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan investasi.
(Windah & Andono, 2013)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei The	Variabel Independent : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependent : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis statistik regresi berganda secara parsial maupun secara simultan untuk menghubungkan GCG dengan kinerja keuangan perusahaan. Analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen GCG

	Indonesian Institute Perception Governance (IICG) Periode 2008-2011		terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan Tobin's-Q, sedangkan jika diukur dengan ROE memiliki pengaruh signifikan. Hasil ini pengukuran ROE sesuai dengan temuan Darmawati et. al (2005), Trinanda dan Mukodim (2010), dan Sami et. al (2012). Namun tidak sesuai dengan temuan Klapper dan Love (2002) untuk pengukuran ROA dan Tobin's-Q. haan.
(Bagita & Tambun, 2016)	<i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Prediktor Kinerja Keuangan Dan Implikasinya Pada Kebijakan Dividen	Variabel Independent : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependent : Kinerja Keuangan dan Kebijakan Dividen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan berpengaruh positif pada kebijakan dividen sedangkan good corporate governance tidak berpengaruh pada kebijakan dividen. Kinerja keuangan memediasi pengaruh good corporate governance pada kebijakan di Lanjutan Tabel 2.2
(Arina Pratiwi & Budiarta, 2018)	Pengaruh Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar	Variabel X : <i>Corporate Governance</i> Variabel Y : Kinerja Keuangan	Berdasarkan hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance: accountability, independency, dan fairness berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparency dan responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar

B. Kerangka Berpikir

Good corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar menciptakan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini

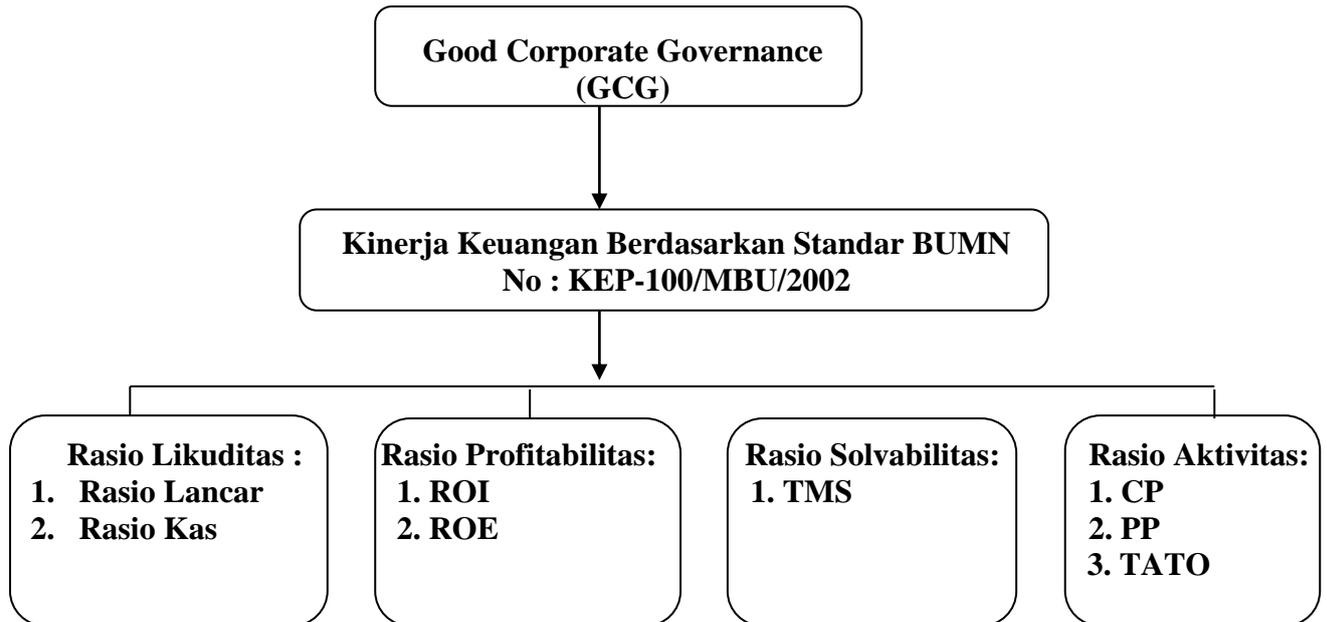
berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Good corporate governance dapat mengurangi resiko yang mungkin akan dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris dengan berbagai keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi. Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja keuangan.

Menurut (Munawir, 2010) menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Sesuai dengan Standar Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002, rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan rasio kas, rasio lancar, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran total aktiva, *return on investment*, *return on equity*, rasio total modal sendiri.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. CGPI adalah sebuah riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI diikuti oleh perusahaan publik, BUMN, Perbankan dan Perusahaan swasta lainnya.

Penelitian (Natalia, 2013) yang menyatakan terdapat pengaruh antara GCG dengan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini GCG diukur berdasarkan CGPI dan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Rasio Lancar, Rasio Kas, CP, PP, ROI dan ROE, TATO, dan TMS yang dapat dilihat di gambar bawah ini.



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

B. Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen *Good corporate governance* serta variabel dependen Kinerja Keuangan. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Good corporate governance

Good corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan juga mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar dapat menciptakan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders.

Dimana alat ukur yang digunakan untuk menguku GCG dilihat dari : persentase Komitmen Tata Kelola Perusahaan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi serta diukur dari aspek lainnya.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelolah keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain. Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio yaitu:

1. Rasio Likuiditas adalah Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio diukur dengan dua rasio yaitu:

Rasio Kas (*Cash Ratio*)

$$\text{Rasio Kas} : \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio Lancar} : \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio diukur dengan dua rasio yaitu:

Return on Investment (ROI)

$$\text{ROI} : \frac{\text{Laba sesudah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return on Equity (ROE)

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba sesudah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio diukur dengan rasio yaitu:

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

$$\text{Rasio} : \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio diukur dengan tiga rasio yaitu:

Collection Period (CP).

$$\text{CP} : \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

Perputaran Persediaan (PP)

$$\text{PP} : \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

Perputaran Total Asset(TATO)

$$\text{TATO} : \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia I Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Juni 2019 sampai dengan November 2019 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Jun				Jul				Agust				Sept				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																				
2	Pra Riset					■	■	■	■																
3	Penyusunan Proposal						■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■											
5	Riset														■										
6	Penulisan Skripsi															■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																							■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka bukan berbentuk kalimat. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang berupa data laporan keuangan dan data GCG untuk tahun 2014 sampai tahun 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu data dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, dan laporan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk periode lima tahun terakhir yakni tahun 2014-2018.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. (Sugiyono, 2017) Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data GCG, data laporan keuangan perusahaan yaitu neraca dan laporan laba rugi, adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Mengukur *Good Corporate Governance* dengan menghitung skor GCG perusahaan
2. Menghitung rasio keuangan perusahaan berdasarkan pada Standar BUMN yang terdiri dari rasio lancar, rasio kas, *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), PP, CP, Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva (TMS), dan Perputaran Total Asset (TATO).
3. Menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur berdasarkan perbandingan rasio keuangan selama tahun pengamatan dengan rasio sesuai dengan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yang telah dilakukan.
4. Menarik Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 dengan Akte Notaris Imas Fatimah SH No.1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 8612 Tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Januari 1999 No. 1 Nama lengkap Perusahaan adalah PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) disingkat PT. Pelindo I (Persero), berkantor pusat di Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411, Sumatera Utara.

PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum perusahaan jasa kepelabuhanan. Pada tahun 1945-1951 perusahaan berada di dalam wewenang Departemen Van Scheepvaart (suatu badan peninggalan pemerintah Belanda) yang berfungsi untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedrijf. Pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah

kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis.

2. Analisis

a. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

1) Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, *comparable* dan mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Transparansi dalam Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selalu berusaha membuat laporan untuk setiap tahunnya. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga selalu membuat rancangan RKAP kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Dan juga membuat laporan periodik setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun buku.

2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan

fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.

Prinsip ini ditunjukkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan adanya *reward and punishment* serta *code of conduct* bagi setiap karyawan.

3) Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan perhatian pada masyarakat sekitar dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

4) Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Dalam hal ini perusahaan dikelola secara independent, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

5) Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan perhatian pada karyawan seperti diklat dan pelatihan, serta pemeliharaan kontinuitas produksi.

Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor yaitu komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan (7%), pemegang saham dan RUPS (9%), dewan komisaris (35%), direksi (35%), pengungkapan dan keterbukaan informasi (9%), faktor lainnya (5%). Adapun pengukuran untuk *Good Corporate Governance* yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Good Corporate Governance
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Aspek Pengujian/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Standar BUMN
Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan	6,69%	6,69%	6,7%	6,22%	6,27%	7%
Pemegang saham dan RUPS	8,72%	8,74%	8,74%	8,41%	8,37%	9%
Dewan komisaris	34,58%	34,59%	34,61%	34,53%	34,58%	35%
Direksi	34,57%	34,57%	34,58%	33,10%	33,10%	35%
Pengungkapan dan keterbukaan informasi	8,35%	8,35%	8,36%	7,05%	7,29%	9%
Faktor lainnya	1,25%	1,25%	1,25%	5%	5%	5%
Total	94,16%	94,19%	94,23%	94,3%	94,6%	100%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa untuk skor *good corporate governance* (GCG) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, walaupun mengalami peningkatan tetapi skor total dari *good corporate governance* (GCG) masih berada dibawah dari standar BUMN. Adapun GCG yang masih berada dibawah dari standar BUMN untuk tahun 2016

sampai tahun 2018 terjadi pada 5 indikator yang terdiri dari Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan dan Pemegang saham dan RUPS, Dewan komisaris, Direksi dan Pengungkapan dan keterbukaan informasi.

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 tahun dalam 2 bentuk yaitu penilaian (*assessment*) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (*review*) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh dewan komisaris.

b. Penerapan Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan

Salah satu evaluasi kinerja perusahaan adalah dengan mengevaluasi aspek kinerja keuangan perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Aspek keuangan yang dievaluasi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* meliputi delapan rasio keuangan. Rasio keuangan yang diukur sesuai dengan rasio lancar, rasio kas, ROI, ROE, CP, PP, TMS, dan TATO yang sesuai dengan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 (Permenakertrans, 2011) yang diukur dalam empat tahun penelitian yaitu :

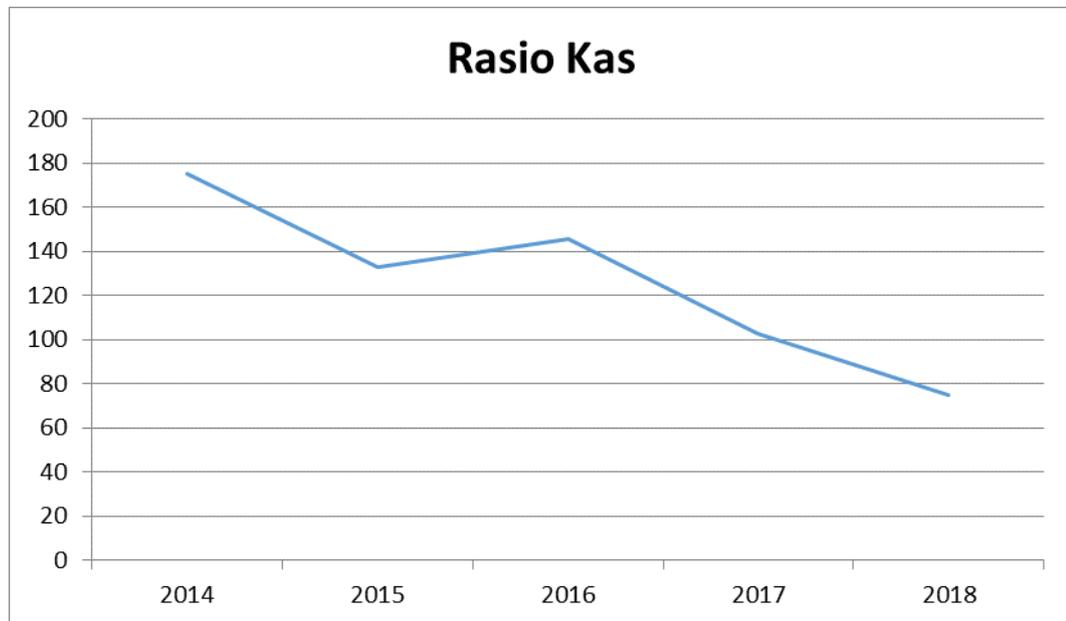
1) Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Perhitungan rasio ini dapat diukur dari kas ditambah bank dibandingkan dengan utang lancar. Perhitungan rasio kas pada perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rasio Kas
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Kas + Bank	Utang Lancar	Rasio Kas	Standar BUMN
2014	1.272.712.369.649	727.173.225.024	175,02%	> 35%
2015	1.479.384.440.740	1.114.460.837.571	132,7%	> 35%
2016	2.200.769.796.594	1.511.586.760.001	145,6%	> 35%
2017	1.872.411.160.625	1.823.137.753.605	102,7%	> 35%
2018	1.999.187.810.035	2.677.740.915.445	74,7%	> 35%

Sumber: data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



Gambar 4.1 : Rasio Kas

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Kas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Tingkat likuid dari suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio kasnya, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penurunan kas terjadi dikarenakan menurunnya ketersediaan uang kas yang dimiliki perusahaan dan juga meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Penilaian terhadap Kas mengalami penurunan dan telah

berada dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 35%.

Rasio kas digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Semakin tinggi rasio kas pada perusahaan berarti perusahaan mampu dalam memenuhi utang jangka pendeknya, sebaliknya Semakin rendah rasio kas pada perusahaan berarti perusahaan tidak mampu dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 35%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio kas yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengalami penurunan tetapi masih berada dibawah standar BUMN, hal ini menunjukkan kondisi yang masih dalam keadaan baik walaupun rasio kas mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan karena menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Yang artinya perusahaan perlu waktu untuk menjual asset lancar lainnya untuk membayar utang lancar perusahaan.

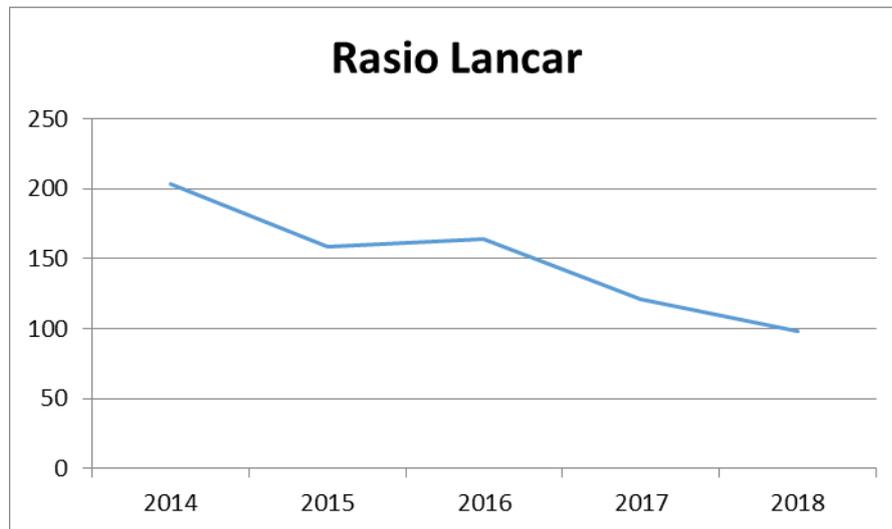
2) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Rasio Lancar
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Asset Lancar	Utang Lancar	Rasio Lancar	Standar BUMN
2014	1.478.307.670.217	727.173.225.024	203,4%	> 125%
2015	1.766.673.446.375	1.114.460.837.571	158,5%	> 125%
2016	2.481.343.189.025	1.511.586.760.001	164,2%	> 125%
2017	2.209.548.446.582	1.823.137.753.605	121,2%	> 125%
2018	2.622.949.895.614	2.677.740.915.445	97,9%	> 125%

Sumber: data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



Gambar 4.2 :Rasio Lancar

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Lancar untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Tingkat likuid dari suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio lancarnya, yang digunakan untuk memenuhi utang lancarnya. Penurunan rasio lancar terjadi dikarenakan menurunnya jumlah asset lancar yang dimiliki perusahaan dan juga meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Penilaian terhadap rasio lancar mengalami penurunan dan telah

berada dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 125%.

Rasio lancar yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya rasio lancar yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan (Hani, 2012).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio lancar yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengalami penurunan. Kondisi yang tidak baik bagi perusahaan karena rasio lancar juga masih jauh dibawah standar BUMN yang artinya perusahaan tidak mampu dalam membayar hutang jangka pendeknya atas asset lancar yang dimilikinya.

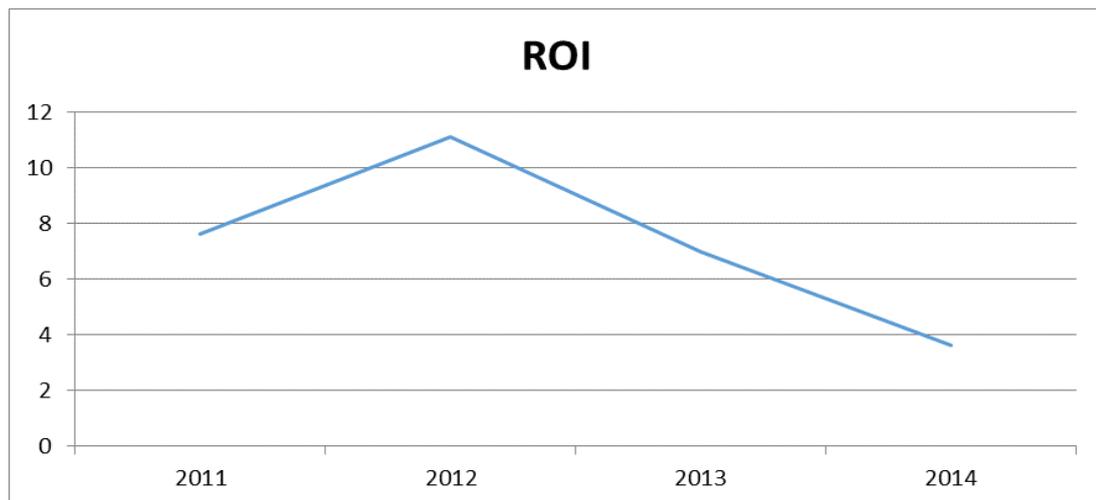
3) Return on Investment (ROI)

Analisis *Return on Investment* (ROI) menggambarkan perbaikan atas kinerja operasi dan mengukur efisiensi dari penggunaan total aktiva untuk menghasilkan profit. Perhitungan rasio *Return on Investment* perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Return On Investment (ROI)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	EBIT + Penyusutan	Capital Empolyed	ROI	Standar BUMN
2014	900.987.990.851	4.855.667.611.582	18,6%	> 18%
2015	1.026.245.960.700	5.491.915.582.071	18,7%	> 18%
2016	1.134.637.898.749	7.301.351.310.259	15,5%	> 18%
2017	1.275.538.014.767	7.223.264.110.880	17,7%	> 18%
2018	1.403.951.423.047	6.950.047.186.151	20,2%	> 18%

Sumber: data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



Gambar 4.3 :ROI

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa ROI untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih perusahaan yang dikarenakan rendahnya perputaran terhadap asset. Meningkatnya ROI menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu dalam menjaga stabilitas finansialnya.

Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil atau rendahnya ROI, maka semakin kurang baik tingkat pengembalian investasi pada perusahaan, sebaliknya jika ROI semakin besar, maka semakin baik tingkat pengembalian investasi. Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 18%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROI yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cenderung mengalami peningkatan, dimana untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 ROI pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik karena ROI diatas standar BUMN sebesar 18%, hal ini disebabkan karena meningkatnya

laba bersih perusahaan yang dikarenakan rendahnya perputaran terhadap asset yang dimiliki perusahaan.

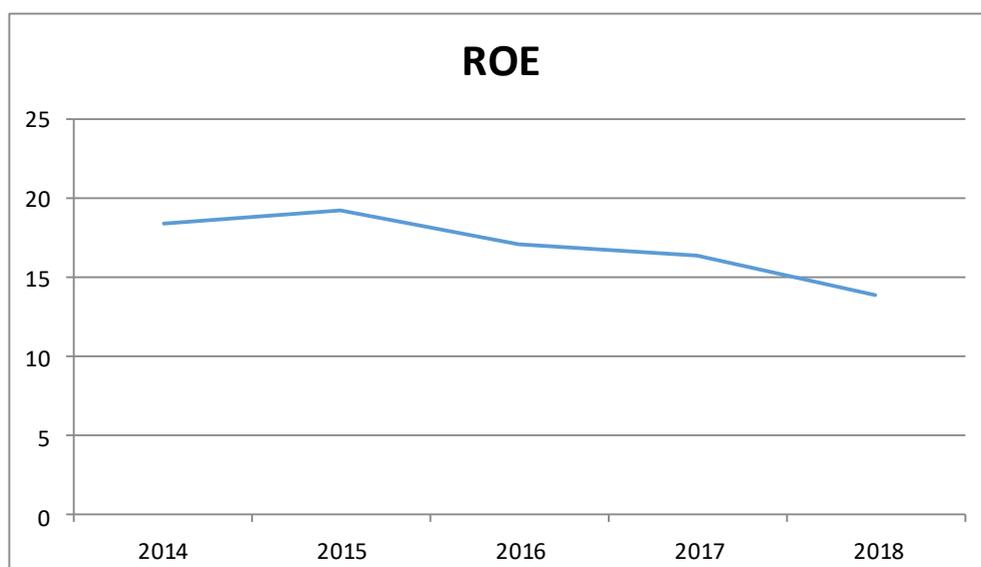
4) Return on Equity (ROE)

ROE adalah ukuran yang mewakili harapan dari shareholder. Sebab tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan dapat langsung diketahui dan menggambarkan keefektifan atas investasi yang dilakukan oleh shareholder, Perhitungan rasio *Return on Equity* perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Return On Equity (ROE)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri	ROE	Standar BUMN
2014	586.602.467.634	3.181.435.347.673	18,4%	> 15%
2015	700.368.026.993	3.640.225.089.250	19,2%	> 15%
2016	733.302.457.110	4.301.175.911.318	17,04%	> 15%
2017	805.144.812.107	4.904.223.761.283	16,4%	> 15%
2018	904.870576.473	6.479.577.389.384	13,9%	> 15%

Sumber: data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



Gambar 4.4 Return On Equity

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa ROE untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, bahkan ditahun 2018 ROE berada dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hasil pengembalian ekuitas semakin menurun, yang mengakibatkan posisi pemilik perusahaan tidak optimal.

Hasil pengembalian ekuitas dilakukan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi tingkat hasil pengembalian ekuitas, maka semakin baik kondisi perusahaan, yang artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat pula. Sebaliknya jika tingkat hasil pengembalian ekuitas semakin menurun, maka semakin buruk kondisi perusahaan, yang artinya posisi pemilik perusahaan semakin lemah. Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 15%..

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk *Return on Equity* yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, bahkan ditahun 2018 ROE dibawah standar BUMN. Kondisi yang tidak begitu baik bagi perusahaan karena ROE masih jauh dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, sebesar 15%, yang artinya posisi pemilik perusahaan akan semakin lemah, pada modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena modal perusahaan banyak dibiayai dari utang perusahaan.

5) *Total Assets Turnover (TATO)*

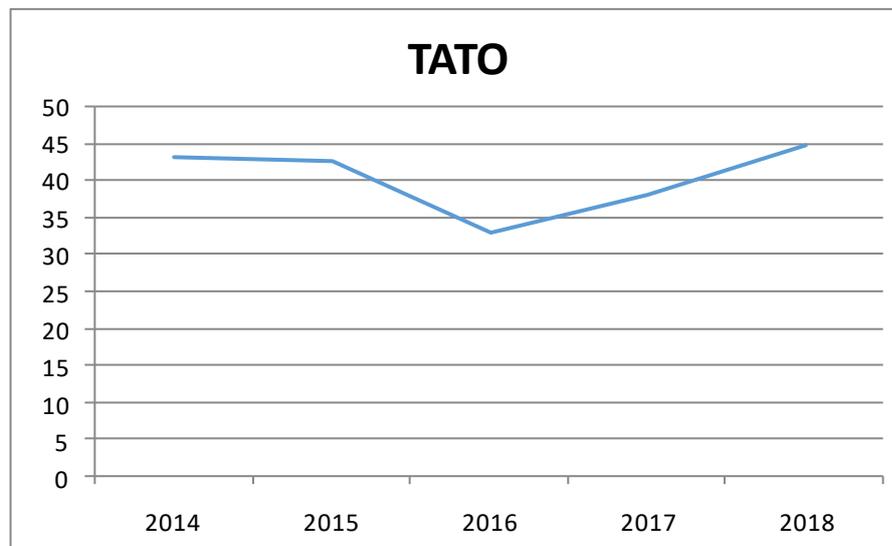
TATO yaitu ukuran untuk menilai seberapa baik perusahaan mengelola aktivitasnya dalam menghasilkan penjualan, Perhitungan rasio *Total Assets*

Turnover perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Total Asset TurnOver (TATO)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Pendapatan	Capital Empolyed	TATO	Standar BUMN
2014	2.095.520.953.158	4.855.667.611.582	43,2%	> 120%
2015	2.340.724.008.344	5.491.915.582.071	42,6%	> 120%
2016	2.408.899.664.963	7.301.351.310.259	32,9%	> 120%
2017	2.751.106.508.170	7.223.264.110.880	38,1%	> 120%
2018	3.113.532.579.657	6.950.047.186.151	44,8%	> 120%

Sumber: *data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*



Gambar 4.5 TATO

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa TATO untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, hanya ditahun 2017 dan tahun 2018 TATO mengalami peningkatan. Total Assets Turnover (TATO) merupakan perbandingan antara penjualan bersih dengan total aktiva dalam perusahaan. Di

mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. Jadi semakin besar rasio ini maka semakin baik.

Berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba, sehingga menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain jumlah aset yang sama dapat memperbesar volume penjualan apabila Total Assets Turnover ditingkatkan atau diperbesar (Ardila & Putri, 2015) Hal ini dapat disimpulkan bahwa TATO yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, hanya ditahun 2017 dan tahun 2018 TATO mengalami peningkatan , hal ini terjadinya karena kenaikan yang cukup besar pada penjualan dibandingkan dengan kenaikan aktiva. Walaupun TATO mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah standar BUMN, yang artinya penilaian terhadap TATO kurang baik, karena masih dibawah standar BUMN.

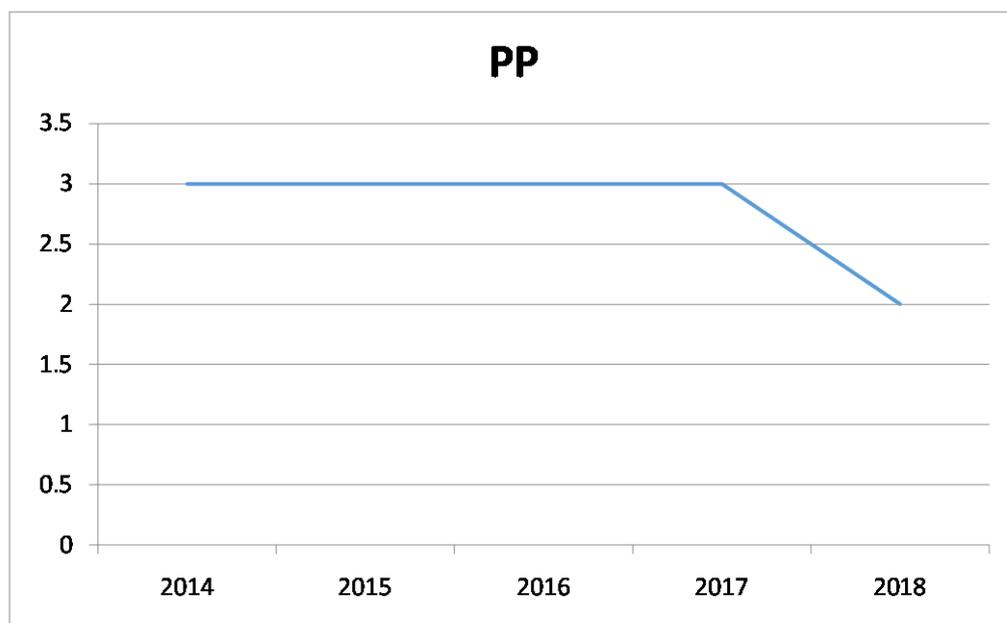
6) *Perputaran Persediaan (PP)*

Perputaran persediaan adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi harga pokok barang yang terjual (*cost of good sold*) dengan persediaan. Rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengatur persediaanya, yaitu dengan menunjukkan berapa kali perputaran persediaan selama satu tahun. Perhitungan rasio *Perputaran Persediaan* perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Perputaran Persediaan (PP)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Persediaan	Pendapatan Usaha	PP	Standar BUMN
2014	17.302.906.753	2.095.520.953.158	3 hari	< 60
2015	21.226.159.916	2.340.724.008.344	3 hari	< 60
2016	20.116.083.124	2.408.899.664.963	3 hari	< 60
2017	23.716.976.975	2.751.106.508.170	3 hari	< 60
2018	25.388.282.754	3.113.532.579.657	2 hari	< 60

Sumber: data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



Gambar 4.6. Perputaran Persediaan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Perputaran Persediaan untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Semakin kecil tingkat perputaran persediaan pada perusahaan, maka semakin baik bagi perusahaan, karena semakin kecil jumlah persediaan pada perusahaan maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan, maka semakin besar juga laba yang akan diterima oleh perusahaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa PP yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dan berada jauh dari standar BUMN, yang artinya penilaian terhadap PP cukup baik, karena tidak telalu melebihi dari standar BUMN.

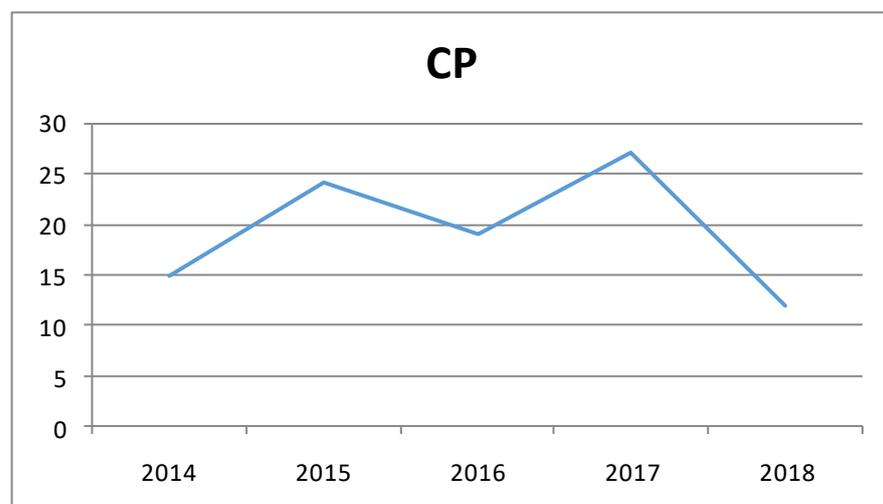
7) *Colecction Periods* (CP)

Colecction Periods (CP) yaitu Periode pengumpulan piutang rata-rata adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih piutang-piutangnya. Perhitungan rasio *Colecction Periods* perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Colecction Period (CP)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Piutang	Pendapatan Usaha	CP	Standar BUMN
2014	85.503.925.290	2.095.520.953.158	15 hari	< 60
2015	155.877.564.385	2.340.724.008.344	24 hari	< 60
2016	125.321.592.573	2.408.899.664.963	19 hari	< 60
2017	200.578.860.395	2.751.106.508.170	27 hari	< 60
2018	102.244.069.626	3.113.532.579.657	12 hari	< 60

Sumber: data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



Gambar 4.7 Perputaran Piutang

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Perputaran Piutang untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2016 perputaran piutang mengalami penurunan, ditahun 2017 perputaran piutang mengalami peningkatan, dan ditahun 2018 perputaran piutang kembali mengalami penurunan. Semakin kecil tingkat perputaran piutang pada perusahaan, maka semakin baik bagi perusahaan, karena semakin kecil jumlah piutang pada perusahaan maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan, maka semakin besar juga laba yang akan diterima oleh perusahaan.

Semakin cepat piutang dikumpulkan, atau semakin kecil nilai *Average Collection Period* (ACP), semakin besar pula profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Periode pengumpulan piutang rata-rata adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih piutang-piutangnya. (Raheman and Nasr, 2011)

Hal ini dapat disimpulkan bahwa CP yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 berada dibawah standar BUMN, yang artinya penilaian terhadap CP sudah baik, karena tidak melebihi dari standar BUMN , hal ini baik bagi perusahaan dikarenakan penurunnya jumlah piutang yang dimiliki perusahaan sehingga pendapatan perusahaan mengalami peningkatan.

8) Total Modal Sendiri (TMS)

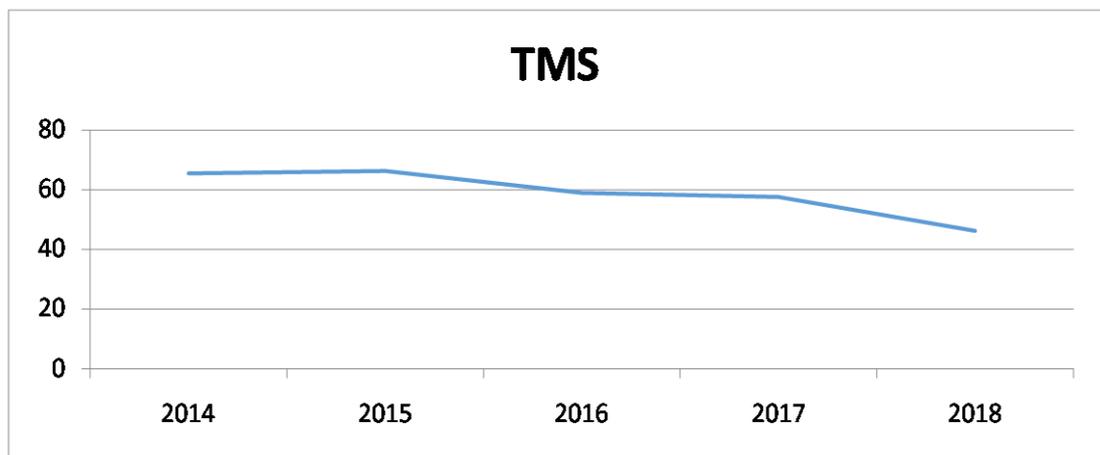
Total Modal Sendiri (TMS) yaitu Rasio yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat direalisasi sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. Perhitungan rasio *Colecction*

Periods perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Modal Sendiri	Total Asset	TMS	Standar BUMN
2014	3.181.435.347.673	4.855.667.611.581	65,5%	30% s/d 40%
2015	3.640.225.089.250	5.491.915.582.071	66,3%	30% s/d 40%
2016	4.301.175.911.318	7.301.351.310.259	58,9%	30% s/d 40%
2017	4.904.223.761.283	8.507.143.315.748	57,6 %	30% s/d 40%
2018	6.479.577.389.384	14.020.852.858.111	46,2%	30% s/d 40%

Sumber: *data yang diolah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*



Gambar 4.7 TMS

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Modal Sendiri untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

Jika rasio ini lebih dari 100 % berarti modal sendiri melebihi total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pemilik perusahaan dan sebagian dari aktiva lancar juga dibiayai oleh pemilik perusahaan. Sebaliknya jika rasio dibawah 100 % berarti sebagian aktiva tetapnya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek/jangka panjang sedang aktiva lancarnya seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri mengalami penurunan dan dalam keadaan cukup baik. Dimana rasio modal sendiri berada dari kisaran antara 30% dan 40%, hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan tidak banyak dibiayai oleh pihak eksternal perusahaan, atau perusahaan banyak didanai dari hutang-gutang perusahaan. Standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30% dan 40%

B. Pembahasan

1. Penilaian GCG yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Penilaian *good corporate governance* (GCG) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, walaupun mengalami peningkatan tetapi skor total dari *good corporate governance* (GCG) masih berada dibawah dari standar BUMN. Dimana *good corporate governance* (GCG) yang diterapkan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) masih memiliki kelemahan dalam beberapa indikator, hal ini terlihat dari Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan dimana pihak perusahaan belum sepenuhnya, dimana Komitmen penerapan GCG tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan aturan-aturan yang berlaku namun praktiknya juga harus dilandasi oleh kesadaran

tentang pentingnya GCG bagi tegaknya integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan, selain itu juga terlihat dari indikator Pemegang saham dan RUPS yang masih dibawah standar BUMN, dimana masih adanya kegiatan dalam penanganan proyek perusahaan yang dilakukan berdasarkan karena adanya hubungan secara pribadi yang lebih baik dengan salah satu pemegang saham, dan juga terdapat kelemahan dari indikator Dewan komisaris, Direksi dan Pengungkapan dan keterbukaan informasi yang masih belum sepenuhnya transparan.

2. Kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 dalam keadaan yang belum cukup baik, hal ini didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio kas yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cenderung mengalami penurunan untuk setiap tahunnya, kecuali ditahun 2016 rasio kas mengalami peningkatan, tetapi masih berada diatas standar BUMN, hal ini menunjukkan kondisi yang masih dalam keadaan baik walaupun rasio kas mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan karena menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Yang artinya perusahaan perlu waktu untuk menjual asset lancar lainnya untuk membayar utang lancar perusahaan
- b. Rasio lancar yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cenderung mengalami penurunan untuk setiap tahunnya, kecuali ditahun 2016 rasio kas mengalami peningkatan. Kondisi yang tidak

baik bagi perusahaan karena rasio lancar untuk tahun 2018 masih jauh dibawah standar BUMN yang artinya perusahaan tidak mampu dalam membayar hutang jangka pendeknya atas asset lancar yang dimilikinya

- c. ROI yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cenderung mengalami peningkatan, dimana untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 ROI pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik karena ROI diatas standar BUMN sebesar 18%, hal ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih perusahaan yang dikarenakan rendahnya perputaran terhadap asset yang dimiliki perusahaan.
- d. ROE yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, bahkan ditahun 2018 ROE dibawah standar BUMN. Kondisi yang tidak begitu baik bagi perusahaan karena ROE masih jauh dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, sebesar 15%, yang artinya posisi pemilik perusahaan akan semakin lemah, pada modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena modal perusahaan banyak dibiayai dari utang perusahaan
- e. TATO yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, hanya ditahun 2017 dan tahun 2018 TATO mengalami peningkatan , hal ini terjadinya karena kenaikan yang cukup besar pada penjualan dibandingkan dengan kenaikan aktiva. Walaupun TATO mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah standar BUMN, yang artinya

penilaian terhadap TATO kurang baik, karena masih dibawah standar BUMN

- f. PP yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dan berada jauh dari standar BUMN, yang artinya penilaian terhadap PP cukup baik, karena tidak telalu melebihi dari standar BUMN
- g. CP yang sampai tahun 2018 berada dibawah standar BUMN, yang artinya penilaian terhadap CP sudah baik, karena tidak melebihi dari standar BUMN , hal ini baik bagi perusahaan dikarenakan penurunnya jumlah piutang yang dimiliki perusahaan sehingga pendapatan perusahaan mengalami peningkatan
- h. Rasio modal sendiri mengalami penurunan dan dalam keadaan cukup baik. Dimana rasio modal sendiri berada dari kisaran antara 30% dan 40%, hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan tidak banyak dibiayai oleh pihak eksternal perusahaan, atau perusahaan banyak didanai dari hutang-gutang perusahaan. Standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30% dan 40%

3. GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan

Penilaian *Good Corporate Governance* sebagai alat dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menunjukkan keadaan yang tidak sejalan. Dimana dengan skor GCG untuk tahun 2018 yang mengalami peningkatan, yang tidak berdampak dengan kinerja keuangan perusahaan,

terbukti dengan skor GCG pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang mengalami peningkatan dan memperoleh skor yang tinggi yang diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah hutang perusahaan yang mengalami peningkatan, bahkan hutang lancar perusahaan melebihi asset lancar perusahaan . Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan GCG yang baik belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, hal ini tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Menurut (Saragih, 2013) manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, ditinjau dari penilaian GCG dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian *good corporate governance* (GCG) untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, walaupun mengalami peningkatan tetapi skor total dari *good corporate governance* (GCG) masih berada dibawah dari standar BUMN. Adapun GCG yang masih berada dibawah dari standar BUMN, hal ini terjadi penurunan untuk tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi pada 5 indikator yang terdiri dari Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan dan Pemegang saham dan RUPS, Dewan komisaris, Direksi dan Pengungkapan dan keterbukaan informasi
2. Kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 (Permenakertrans, 2011) dalam keadaan yang belum cukup baik, hal ini didasarkan dengan perhitungan rasio yang berdasarkan dengan Standar BUMN
3. Penilaian *Good Corporate Governance* sebagai alat dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menunjukkan keadaan yang tidak sejalan. Dimana dengan skor GCG untuk tahun 2018 yang mengalami peningkatan, yang tidak berdampak dengan kinerja keuangan perusahaan, terbukti dengan skor GCG pada PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero) yang mengalami peningkatan dan memperoleh skor yang tinggi yang diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah hutang perusahaan yang mengalami peningkatan, bahkan hutang lancar perusahaan melebihi asset lancar perusahaan.

B. Saran

Setelah memperhatikan penilaian terhadap GCG dalam mengukur kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur dengan rasio kas, rasio lancar, PP, CP, ROI, ROE, TATO, TMS, penulis ingin memberikan beberapa masukan perihal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero):

1. Sebaiknya manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar memperhatikan tingkat penjualan perusahaan dan pengelolaan asset perusahaan agar perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebaiknya melakukan suatu strategi untuk dapat meningkatkan laba perusahaan, dan mengefisiensikan biaya-biaya operasional perusahaan.
2. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebaiknya melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai *good corporate governance* lebih intens. Upaya yang dilakukan seperti membuat buku saku mengenai panduan *good corporate governance* bagi seluruh karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator - indikator pernyataan dalam masing - terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014 masing variabel yang mampu mengarah kedalam permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., & Putri, ayu anindya. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Arina Pratiwi, P. D., & Budiarta, I. K. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Gaya Kepemimpinan pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(3), 2226–2246. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p22>
- Bagita, & Tambun, S. (2016). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 1(2), 2016.
- Bahtiar, E. T., Nugroho, N., Massijaya, M. Y., Roliandi, H., Rentry, A. N., & Satriawan, A. (2010). A new method to estimate modulus of elasticity and modulus of rupture of glulam I-joist. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1063/1.3537940>
- Drs. Dwi Prastowo D., M.M., A. (2015). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. In *Analisis Laporan Keuangan*.
- FCGI. (2002). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, II(2002), 37.
- Geens, K. (2019). Helpt ‘good corporate governance’? In *Over grenzen en generaties heen*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qf1k1.8>
- Hani, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pemilihan Akuntansi Konservatif. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 12(1), 1–12.
- Komara, A., Hartoyo, S., & Andati, T. (2016). ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i1.141>
- Laksana, J. (2015). CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008-2012). *E-Jurnal Akuntansi*, 11(1), 269–288.
- Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan Edisi 4. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Murhadi, W. R. (2015). Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham. In *Salemba Empat*.
- Natalia, D. (2013). PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK EARNING MANAGEMENT BADAN USAHA SEKTOR PERBANKAN DI BEI 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e32833e77c9>
- Permenakertrans. (2011). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja Tahun 2011. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 2(1), 39.

- Prastantio, M. (2015). Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 27(2), 56–75.
- Saragih, F. (2013). Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. *Jurnal Ekonomikawan*, 12(1), 57–68.
- Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 21). <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.137>
- Windah, G. C., & Andono, F. A. (2013). PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN HASIL SURVEI THE INDONESIAN INSTITUTE PERCEPTION GOVERNANCE (IICG) PERIODE 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–20.
- Wulandari, R. (2013). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*, 2(1976), 1–52.
- Wulandari, S., Manajemen, M., Slamet, U., & Surakarta, R. (2015). PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PDAM KOTA SURAKARTA. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Desember*, 9(2), 196–204.